

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran koperasi. Koperasi yang berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan Indonesia sebagai Negara yang berkembang dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Koperasi yang merupakan badan usaha yang bersifat sosial, dengan melandaskan kegiatan atas dasar koperasi dan kaidah ekonomi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat sekitar, sekaligus gerakan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan.

Berdasarkan UU 25 tahun 1992 Koperasi didefinisikan sebagai “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Definisi dari koperasi ini secara tidak langsung menempatkan koperasi sebagai salah satu badan usaha yang sesuai dengan landasan pengelolaan perekonomian nasional yang berkeadilan sosial, yaitu pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya. Koperasi saat ini telah berkembang ke banyak sektor dengan

banyak fungsi dan jenis kegiatan yang dihasilkan seiring dengan banyaknya kebutuhan masyarakat, menjadi tolak ukur keberhasilan dan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian masyarakat. Dari banyaknya jenis koperasi salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Dalam koperasi ini, anggota memiliki kedudukan identitas ganda yaitu sebagai pemilik dan (*owne*) dan nasabah (*custome*).

Koperasi dengan tujuan, landasan, asas, dan peraturan yang mengikat masih banyak terdengar penyalahgunaan koperasi sebagai pencari keberuntungan pribadi. Hal ini menuntut koperasi untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip koperasi yang diakui, diterima, dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan itu koperasi dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha, meningkatkan kepercayaan publik domestik dan asing terhadap perekonomian nasional, mencegah daya beli masyarakat pada akhirnya membantu menciptakan kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik.

Laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, Laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan

dalam berbagai cara seperti : Arus kas, catatan dan laporan lain, serta menjadi penjelasan yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Selain itu, termasuk skedul dalam dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009).

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkannya diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari koperasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada anggota khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Membuat laporan keuangan merupakan produk akhir proses akuntansi yang telah dilakukan oleh koperasi. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangannya.

Laporan keuangan koperasi yang sebaiknya mampu menyajikan informasi mengenai kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan koperasi yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis dalam upaya pengembangan koperasi. Untuk menyajikan keuangan koperasi perlu adanya pedoman dalam penyusunan sehingga adanya keseragaman dari tiap laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggung jawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang membuat sekurang-kurangnya : 1) Neraca ; 2) Perhitungan Hasil Usaha ; 3) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu: 1) Laporan Perubahan Ekuitas (modal); 2) Laporan Arus Kas.

Untuk koperasi yang bergerak di kegiatan Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 13 Tahun 2015, Laporan Keuangan meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha;
3. Laporan Perubahan Ekuitas (modal);
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan demokrasi ekonomi yang berlandaskan dengan asas kekeluargaan yang dapat berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi anggota. Peraturan Menteri KUKM No.13 Tahun 2015 tentang Pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi yang didasarkan pada SAK UMUM, SAK ETAP, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan Menteri KUKM No. 13 Tahun 2015 juga menyatakan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan simpan pinjam oleh koperasi meliputi SAK UMUM dan SAK ETAP. Peraturan Menteri KUKM No 13 Tahun 2015 disusun agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan dan penyajian informasi yang mudah dipahami, akurat, mudah ditelusuri dan diperiksa, andal, dan dapat diperbandingkan. Dengan adanya suatu pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan usaha simpan pinjam melalui penyajian laporan keuangan yang lebih relevan, akuntabel, dan transparan.

Koperasi Padamukti yang berada di Jalan Pakuwon No 4, Kabupaten Garut awalnya didirikan di lingkungan kantor pemilik sekolah dan kantor PGI (PGRI untuk sekarang), pada tahun 1949 oleh Bapak H. Asikin Kartasmita dan Bapak H. D. Wiradistira. Pada tanggal 5 Februari 1997 terjadi perubahan Anggaran Dasar dengan ini merupakan koperasi simpan pinjam yang telah berbadan hukum dengan Badan Hukum HBH TGL 05 -02 1997 – No.

372/BH/PAD/KWK-10/II/1997. Sebagai koperasi yang mempunyai kegiatan simpan pinjam berusaha untuk menghimpun dana dari anggota dan kemudian menyalurkannya kepada anggota lain yang membutuhkannya mengenakan biaya jasa pinjaman diatur dengan relatif yang ketat seperti dalam pelaporan keuangannya. Ditahun 2015 berkat partisipasi anggota yang baik dan aktif serta para pengurus, pengawas, dan karyawan dapat amanah melaksanakan tugasnya KSP Padamukti dengan kemandirian modal sendiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan besarnya simpanan pokok Rp. 25,000,- dan simpanan wajib miniman Rp. 150,000,-. Kami masih bisa berdiri kokoh dengan selalu mampu melayani kebutuhan anggotanya, dengan besar pinjaman 3 kali besarnya simpanan anggota. Untuk jangka panjang dengan jasa pinjaman 2% menurun jatuh tempo 50 bulan dan untuk jangka pendek dengan jasa pinjaman 3% menurun jatuh tempo 24 bulan. Koperasi Padamukti beranggotakan guru-guru dari guru TK/PAUD, Guru Sekolah Dasar, Guru SMP, Guru SMA/SMK dan Pensiunan serta Pegawai dinas Pendidikan tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Dengan wilayah kerja yang di bagi menjadi 8 kelompok yaitu Garut 1, Garut 2, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karangpawitan, Cilawu, SLTP/SMU/SMK, dan Kelompok Pensiunan serta Pegawai Dinas Pendidikan.

IKOPIN

Tabel 1.1 jumlah anggota tiap kelompok

No	URAIAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	Garut 1	47	137	184
2.	Garut 2	33	136	169
3.	Tarogong Kaler	37	136	173
4.	Tarogong Kidul	36	129	165
5.	Karangpawitan	24	116	140
6.	Cilawu	64	138	202
7.	SLTP/SMU/SMK	58	152	210
8.	Lain – Lain	59	161	220
JUMLAH		358	1.105	1.463

Sumber : RAT Koperasi Padamukti

pada tahun 2020 Koperasi Padamukti memiliki anggota sebanyak 1.463 anggota dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 1.554 anggota. Menurunnya jumlah anggota pada Koperasi Padamukti di sebabkan:

1. Pindahnya ke luar daerah kerja koperasi Padamukti;
2. Merasa berat karena selain ke koperasi Padamukti ada cicilan yang lainnya;
3. Pensiunan;
4. Meninggal Dunia.

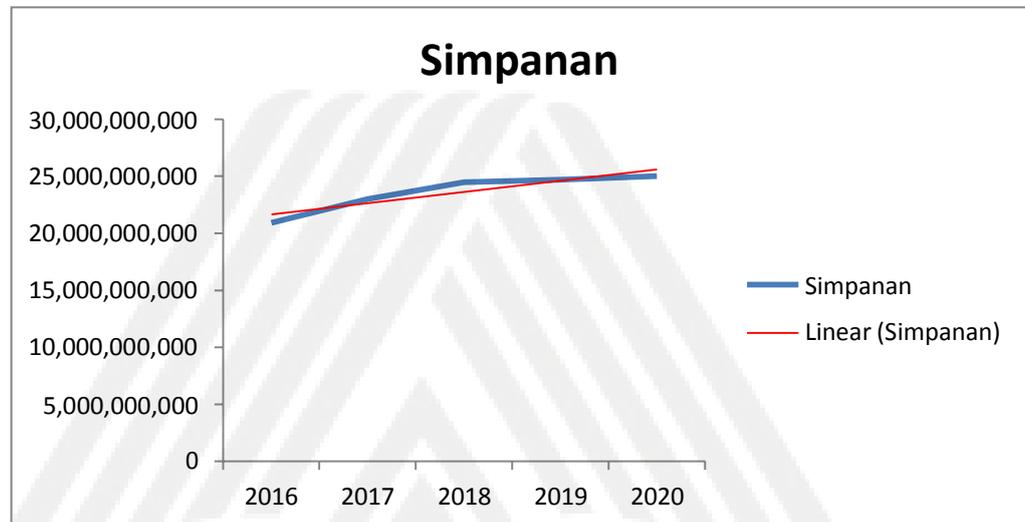
Dalam setiap tahunnya Koperasi Padamukti selalu melaksanakan pendidikan dan pelatihan anggota yang bekerja sama dengan Dekopinda dan Lapendakopda Garut. Koperasi Padamukti aktif juga dalam berbagai lomba yang diselenggarakan antar koperasi di Kabupaten Garut dan sering mendapatkan penghargaan setiap tahunnya baik itu untuk koperasinya, pengurus, dan anggota koperasi Padamukti. Sejauh ini koperasi padamukti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

koperasi Padamukti ini hanya menyajikan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas. Manfaat melakukan analisis ini yaitu :

1. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus kepada anggota dalam satu periode.
2. Laporan keuangan dapat menjadikan informasi sebagai bentuk pengambilan keputusan bagi anggota koperasi.
3. Untuk mengetahui bahwa koperasi telah jujur dalam mengelola usaha sesuai dengan tata nilai, dan jati diri koperasi.
4. Mengetahui sumber daya utama yang dimiliki koperasi dari kewajiban dan kekayaan bersih sebagai ekuitas.
5. Untuk mengetahui transaksi kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomi koperasi .
6. Untuk mengetahui informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di koperasi Padamukti terdapat beberapa informasi yaitu perkembangan simpan pinjam di koperasi Padamukti pada tahun 2016 s/d 2020.

Diagram 1.1 Perkembangan simpanan di koperasi Padamukti dari Tahun 2016-2020

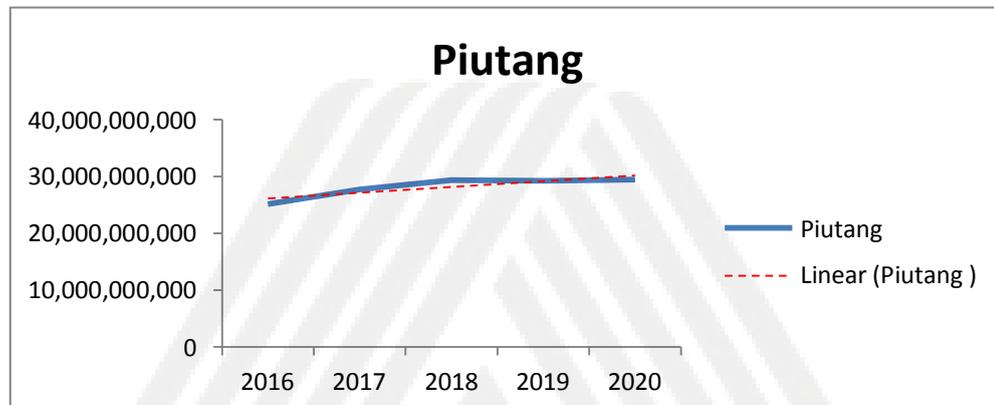


Sumber: Laporan RAT Koperasi Padamukti Tahun 2016-2020

Berdasarkan diagram 1.1 diatas, dari 5 tahun terakhir total simpanan pada koperasi padamukti mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 meskipun dengan terdampaknya covid-19 tidak membuat koperasi padamukti terpuruk dalam menjalankan pelayanan kepada anggota. Jika simpanan naik akan berpengaruh baik pada koperasi karena bisa dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dan akan mendapatkan laba yang lebih besar dari laba sebelumnya.

IKOPIN

Diagram 1.2 Perkembangan Piutang di Koperasi Padamukti dari Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan RAT Koperasi Padamukti Tahun 2016-2020

Berdasarkan Diagram 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa piutang mengalami kenaikan dilihat dari 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan pinjaman. Namun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali di akibatkan adanya dampak pandemi covid-19 yang menambah permasalahan yang mengakibatkan banyak keluhan seperti setoran turun, upaya penagihan terkendala dan tidak maksimal karena serba keterbatasannya. Hal ini yang menyebabkan piutang kembali meningkat pada Koperasi Padamukti. Jumlah piutang berpengaruh secara positif terhadap sisa hasil usaha, ini berarti bahwa semakin banyak pinjaman yang diberikan, maka semakin banyak bunga yang diperoleh sehingga sisa hasil usaha koperasi meningkat.

Berdasarkan data yang ada di koperasi Padamukti Laporan Keuangan belum sepenuhnya sesuai didasarkan pada Permenkop dan UMKM Republik Indonesia No 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, yang lebih baik lagi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Karena

melihat pentingnya laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias yang dapat diinterpretasikan oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan persepsi yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan masalah penelitian “*sejauh mana Koperasi Padamukti ini menerapkan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015?* Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pada Laporan Keuangan Yang Berbasis Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015**” di koperasi Padamukti.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 pada koperasi Padamukti ?
2. Bagaimana upaya perbaikan laporan keuangan pada koperasi Padamukti ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini di maksudkan untuk menganalisis penerapan penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan pada Penerapan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 terhadap penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Padamukti. Juga sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di uraikan, maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. untuk dapat mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan berdasarkan Permenkop No. 13 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan yang seharusnya untuk koperasi dalam penerapan akuntansi yaitu proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi berdasarkan permenkop No.13 Tahun 2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pada Laporan Keuangan Yang Berbasis Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IM/2015.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Koperasi Padamukti Garut

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi pengurus koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akan datang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015. Dengan Laporan Keuangan yang akurat dan lengkap, dan dapat diandalkan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan penambahan ilmu pengetahuan dengan mengetahui kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi padamukti yang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015.